

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

POLITIK KEKUASAAN ATAS TUBUH PEREMPUAN: HEGEMONI IMPERIALIS JEPANG TERHADAP PEMBENTUKAN JUGUN IANFU PADA NOVEL PERAWAN REMAJA DALAM CENGKRAMAN MILITER

Salsabila Veronika Gunawan

Abstrak

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana hegemoni Imperialis Jepang terhadap pembentukan sistem Jugun Ianfu direpresentasikan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer, serta menjelaskan bagaimana praktik tersebut merefleksikan politik kekuasaan atas tubuh perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hermeneutika dalam bingkai teori politik tubuh Michel Foucault, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik eksplorasi perempuan dalam novel tersebut bukan sekadar bentuk kekerasan fisik, melainkan manifestasi dari sistem kekuasaan yang hegemonik dan terselubung. Tubuh perempuan dijadikan alat negara melalui proses dehumanisasi, penghapusan identitas, serta pembungkaman suara. Dalam narasi novel, tubuh perempuan tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri, melainkan diatur sepenuhnya oleh militer sebagai bagian dari strategi perang. Hal tersebut mencerminkan bagaimana kekuasaan Imperialis menjadikan tubuh sebagai wilayah politik, dan novel ini menjadi ruang untuk mengungkap sekaligus melawan praktik kekuasaan yang menormalisasi penindasan atas tubuh perempuan.

Kata Kunci: Politik Tubuh, Politik Kekuasaan, Hegemoni, Jugun Ianfu, Sastra Politik

Pendahuluan

Dalam kajian sosial-politik kontemporer, gender tidak lagi hanya dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi gender ini menciptakan norma-norma peran dan perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya melahirkan relasi kuasa yang timpang. Dalam struktur sosial yang patriarkal, perempuan kerap ditempatkan dalam posisi subordinat dan terpinggirkan. Lebih dari itu, tubuh perempuan menjadi wilayah yang

dikontrol secara sosial dan simbolik, dipantau, diatur, dan dinilai melalui berbagai institusi dan norma yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, konsep politik tubuh menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara halus namun sistemik terhadap tubuh manusia, terutama tubuh perempuan. Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat represif dan vertikal, tetapi juga bersifat mikro, menyebar, dan tersembunyi dalam praktik sosial sehari-hari (Zukin, 1996). Kekuasaan modern tidak lagi beroperasi hanya melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pengawasan, pendisiplinan, dan internalisasi norma. Tubuh manusia, terutama tubuh perempuan, menjadi objek utama dari proses pendisiplinan ini. Ia dikendalikan bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh institusi lain seperti militer, agama, sekolah, hingga media (Mudhoffir, 2013).

Dalam kerangka ini, tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek sosial, tetapi juga alat dalam distribusi kekuasaan. Martin Wight, dalam bukunya Power Politics, menegaskan bahwa dalam tatanan internasional yang anarkis, kekuasaan menjadi prinsip dominan dalam interaksi antaraktor, di mana kekuatan militer, pengaruh politik, dan dominasi dijadikan alat utama untuk mempertahankan atau memperluas kepentingan (Wight, 2002). Konsep power politics tidak hanya berlaku dalam relasi antarnegara, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam skala yang lebih mikro, termasuk dalam relasi sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai arena kontestasi. Dalam hal ini, tubuh perempuan tidak netral, melainkan menjadi medan tempat berlangsungnya praktik dominasi, kontrol, dan negosiasi kekuasaan yang kompleks. Tubuh perempuan, dalam situasi tertentu, dijadikan "sumber daya" yang dikendalikan oleh negara untuk kepentingan politik, ekonomi, atau militer. Dalam konteks imperialisme, negara penjajah menjalankan kekuasaannya secara langsung atas tubuh-tubuh perempuan untuk menopang sistem dominasi dan stabilitas ideologis.

Salah satu contoh nyata dari praktik tersebut adalah sistem Jugun Ianfu yang dijalankan oleh militer Jepang selama masa pendudukan di Asia, termasuk Indonesia. Melalui kebijakan ini, ribuan perempuan terutama yang masih muda dipaksa untuk menjadi budak seksual bagi tentara Jepang. Tubuh mereka dimobilisasi secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan biologis militer, dengan dalih menjaga moral dan kesehatan

tentara. Dalam sistem ini, tubuh perempuan tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri, melainkan oleh negara dan militer. Praktik Jugun Ianfu merupakan bentuk ekstrem dari gabungan antara politik tubuh dan politik praktis, di mana negara secara sadar menggunakan tubuh perempuan sebagai alat politik.

Politik praktis tidak hanya dipahami sebagai urusan kenegaraan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai proses perebutan, pengelolaan, dan pembagian sumber daya serta kekuasaan yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam pemahaman ini, politik mencakup pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh sesuatu, pada waktu kapan manfaat itu diberikan, dan melalui cara apa distribusi kepentingan tersebut terjadi. Dengan demikian, politik hadir dalam relasi-relasi sosial yang nyata, tidak terbatas pada lembaga negara atau aktor pemerintahan, tetapi juga menyentuh dinamika sehari-hari di dalam masyarakat. Praktik Jugun Ianfu dapat dipahami sebagai bentuk yang paling ekstrem dari pertemuan antara politik tubuh dan politik praktis. Negara pada masa itu secara sengaja menjadikan tubuh perempuan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kekuasaan dan kepentingan militer. Tubuh perempuan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdaulat atas dirinya sendiri, tetapi diperlakukan sebagai objek yang dapat dikendalikan, dimobilisasi, dan dieksplorasi demi kepentingan politik yang lebih luas.

Lebih lanjut, dominasi seperti ini tidak hanya bekerja melalui tindakan kekerasan fisik yang tampak secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme yang lebih halus, yakni hegemoni budaya yang meresap ke dalam kesadaran masyarakat. Kekuasaan dalam konteks ini tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan militer atau ancaman yang bersifat koersif, melainkan dapat diterima secara sukarela oleh kelompok yang didominasi ketika mereka telah menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan pandangan dunia yang dibentuk oleh kelompok yang berkuasa. Seperti dijelaskan oleh Antonio Gramsci, kekuasaan bisa beroperasi bukan hanya melalui kontrol material, tetapi melalui penerimaan aktif atas nilai-nilai dominan yang dianggap wajar dan sah dalam tatanan sosial tertentu (Lestari, 2019). Dengan kata lain, masyarakat dapat tunduk tanpa merasa sedang ditundukkan, karena mereka mempercayai bahwa struktur kekuasaan yang ada merupakan sesuatu yang natural dan tak terelakkan.

Dalam konteks praktik Jugun Ianfu, proses hegemonik ini tampak melalui cara negara dan otoritas militer membingkai tubuh perempuan sebagai alat pengabdian kepada negara, simbol kehormatan militer, serta bagian dari pengorbanan kolektif demi kemenangan perang. Tubuh perempuan bukan hanya dijadikan objek kekuasaan secara fisik melalui penahanan, pemaksaan, dan eksplorasi seksual, tetapi juga dilegitimasi secara ideologis melalui doktrin nasionalisme, wacana pengorbanan demi kepentingan negara, serta keyakinan mengenai pentingnya menjaga moral dan kebutuhan biologis tentara di medan perang. Melalui konstruksi ideologis tersebut, praktik eksplorasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai tindakan kekerasan, tetapi direpresentasikan sebagai tanggung jawab sosial dan panggilan kehormatan bagi perempuan dalam masyarakat yang menjajah maupun yang terjajah.

Refleksi atas praktik kekuasaan semacam ini dapat ditemukan dalam karya sastra, yang tidak hanya berfungsi sebagai produk estetika, tetapi juga sebagai dokumen sosial-politik yang merekam ketimpangan dan trauma sejarah. Novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer secara eksplisit menarasikan bagaimana tubuh perempuan dijadikan objek eksplorasi seksual oleh militer Jepang. Tokoh-tokoh dalam novel tersebut menggambarkan kondisi tragis perempuan yang kehilangan otonomi tubuh dan martabatnya akibat kekuasaan imperialis. Tubuh perempuan dalam novel ini menjadi representasi bangsa yang dijajah dan dikalahkan, serta menjadi arena perebutan kuasa antara penjajah dan yang dijajah.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk membaca ulang sejarah kekuasaan atas tubuh perempuan dalam konteks Imperialisme Jepang, dengan menggunakan pendekatan teori politik tubuh. Melalui analisis terhadap novel Pramoedya, studi ini berupaya mengungkap bagaimana tubuh perempuan direduksi menjadi objek kekuasaan negara dan bagaimana kekerasan tersebut direpresentasikan dalam narasi sastra. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian interdisipliner antara gender, politik, dan sastra, serta menjadi kontribusi kritis terhadap wacana kekuasaan yang sering membungkam suara perempuan dalam sejarah resmi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk mengungkap makna dari apa yang tidak terlihat. Dalam penelitian ini, ingin mengungkap bagaimana hegemoni Imperialis Jepang terhadap pembentukan Jugun Ianfu pada novel “Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer”. Data diperoleh melalui penelitian pustaka, dengan sumber berupa buku, jurnal, dan kajian terdahulu yang relevan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika, sehingga dalam proses menerjemahkan teks dari bahasa asing ke bahasa kita, kita perlu memahami isi teks terlebih dahulu, kemudian berusaha menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain melalui pilihan kata dan terjemahan yang tepat (Hardiman, 2025). Pada penelitian ini maka akan menyangsar pada pemahaman terhadap teks novel “Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer”. Berdasarkan pendekatan penelitiannya, maka Teknik analisis data yang digunakan adalah hermeneutika dari Hans-Georg Gadamer. Pendekatan analisis ini dipilih karena mampu memperdalam serta memaksimalkan proses penafsiran terhadap teks yang diteliti. Metode ini juga menekankan pentingnya konsep fusion of horizons, yakni pertemuan cakrawala antara penafsir dan teks untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh.

Gender dan Politik Kekuasaan dalam Karya Sastra

Gender merupakan kategori sosial yang terbentuk melalui proses konstruksi historis, kultural, dan politis yang berlangsung di tengah masyarakat, sehingga tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang melekat secara alamiah atau biologis pada diri seseorang sejak lahir. Identitas dan peran gender dibangun melalui nilai, norma, dan praktik sosial yang secara turun-temurun direproduksi, kemudian dilembagakan melalui berbagai institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, media, dan negara. Karena sifatnya yang dibentuk oleh masyarakat, gender selalu bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti konteks sosial serta perkembangan zaman.

Dalam dinamika sosial-politik, konstruksi gender tersebut turut membentuk relasi kuasa yang sering kali tidak seimbang. Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi subordinat, distereotipkan dengan karakteristik tertentu, dan dibatasi dalam akses terhadap ruang publik, sumber daya, maupun partisipasi politik. Relasi timpang ini dapat

terlihat dari pembagian kerja berbasis gender, praktik marginalisasi, dominasi simbolik, serta lahirnya kebijakan yang tidak sensitif gender. Ketimpangan tersebut bukan hanya muncul dalam kehidupan domestik sehari-hari, tetapi juga terinternalisasi dalam struktur sosial dan pemerintahan yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran kritis dan gerakan feminis, pemahaman terhadap gender mengalami transformasi paradigma dari waktu ke waktu. Kajian gender tidak lagi sebatas mempersoalkan perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi berkembang menjadi analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana identitas gender digunakan sebagai instrumen kekuasaan, bagaimana negara dan institusi memproduksi ketidaksetaraan, serta bagaimana perempuan dan kelompok rentan lainnya berupaya merebut ruang kebebasan dalam sistem sosial yang hierarkis. Dalam konteks pembangunan dan kebijakan publik, perspektif gender menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap program, regulasi, dan keputusan politik dirancang secara inklusif, adil, dan mampu mengoreksi ketimpangan yang telah dilembagakan dalam masyarakat.

Pendekatan Women in Development (WID) mulai dikenal pada awal tahun 1970-an sebagai respons terhadap kenyataan bahwa perempuan selama ini kurang dilibatkan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini berupaya memasukkan perempuan ke dalam program-program pembangunan yang sebelumnya didominasi oleh perspektif maskulin. Namun, WID sering dikritik karena hanya bersifat *add women and stir*, yakni sekadar menambahkan perempuan ke dalam sistem pembangunan yang sudah ada tanpa mengubah struktur dasar yang melanggengkan ketidaksetaraan gender. Dengan kata lain, WID belum menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan perempuan tetap berada dalam posisi marginal.

Selanjutnya, muncul pendekatan Women and Development (WAD) yang berkembang pada akhir tahun 1970-an hingga 1980-an. WAD menyoroti bahwa ketimpangan gender tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kurangnya keterlibatan perempuan, tetapi terkait erat dengan struktur ekonomi-politik kapitalisme global. Perempuan dipandang sebagai kelompok yang mengalami eksplorasi ganda, baik sebagai pekerja dalam sistem ekonomi maupun sebagai pengelola kerja domestik

yang tidak dibayar. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menekankan analisis struktural ketimbang sekadar partisipasi praktis perempuan dalam pembangunan.

Perkembangan pemikiran gender kemudian berlanjut pada pendekatan Gender and Development (GAD) yang muncul pada pertengahan 1980-an. Berbeda dari dua pendekatan sebelumnya yang lebih terfokus pada perempuan, GAD menekankan pentingnya menganalisis relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Fokus GAD bukan hanya meningkatkan peran perempuan, tetapi juga mengubah struktur sosial, budaya, dan politik yang melanggengkan ketidaksetaraan tersebut. GAD menilai bahwa pembangunan yang adil membutuhkan transformasi relasi gender, bukan hanya peningkatan akses bagi perempuan.

Tahap berikutnya ditandai dengan berkembangnya strategi kebijakan Gender Mainstreaming (GM) yang mulai diterapkan secara luas sejak tahun 1990-an dan semakin menguat pada era globalisasi. GM menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan dan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menghapus struktur sosial yang mendiskriminasi kelompok berdasarkan gender (Sweinstani, 2021).

Perkembangan paradigma ini tidak hanya penting dalam kajian pembangunan, tetapi juga dalam memahami bagaimana tubuh perempuan diposisikan dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks Imperialisme militer seperti yang digambarkan pada novel *Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer*, tubuh perempuan tidak hanya terpinggirkan, tetapi juga dijadikan objek eksploitasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan gender tidak hanya berlangsung di ranah sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam tubuh itu sendiri sebagai lokasi kekuasaan yang paling konkret. Di sinilah konsep politik tubuh menjadi penting, karena ia membantu membaca bagaimana negara atau kekuasaan politik mengatur dan menggunakan tubuh terutama tubuh perempuan sebagai alat dominasi. Untuk melihat lebih jauh bagaimana kekuasaan bekerja melalui tubuh dapat kita lihat dalam konteks sastra, yang mana penting untuk menelaah bagaimana karya sastra menjadi ruang representasi sekaligus kritik terhadap relasi kuasa tersebut. Dalam

ruang inilah politik tubuh dan politik praktis dapat dibaca secara lebih dalam melalui bahasa, narasi, dan peran tokoh yang dibangun oleh penulis.

Karya sastra merupakan ruang simbolik sekaligus ruang kultural yang mampu merepresentasikan berbagai realitas sosial, politik, dan kultural yang hidup di tengah masyarakat, termasuk dinamika kekuasaan yang bekerja dan mempengaruhi pengalaman manusia. Melalui alur cerita, karakter, latar, dan sudut pandang penceritaan, karya sastra tidak hanya menjadi sarana hiburan atau estetika, tetapi juga media untuk membongkar struktur sosial yang tidak terlihat, mengkritik praktik kekuasaan yang menindas, serta menampilkan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, sastra berfungsi sebagai arena reflektif yang memungkinkan pembaca memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam kehidupan manusia.

Kekuasaan dalam karya sastra tidak selalu hadir secara eksplisit melalui tindakan koersif, ancaman, ataupun bentuk kekerasan fisik yang mudah dikenali. Kekuasaan kerap bekerja secara halus melalui representasi relasi sosial antar tokoh, dialog, narasi, dan nilai-nilai yang dilekatkan pada identitas tertentu. Melalui strategi tersebut, wacana dominan dapat direproduksi, dipertahankan, atau justru ditantang oleh penulis untuk membuka kesadaran baru bagi pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa sastra memiliki kemampuan untuk menyingkap proses hegemonik dalam kehidupan sosial, yaitu ketika ideologi tertentu diterima secara sukarela oleh tokoh atau masyarakat dalam cerita tanpa perlu paksaan langsung.

Dalam konteks tertentu, karya sastra juga menjadi arena penting untuk melihat bagaimana tubuh, terutama tubuh perempuan dibentuk, dikonstruksi, dan diobjektifikasi melalui bahasa, narasi, serta simbol-simbol budaya. Tubuh perempuan sering kali tidak hanya menjadi elemen deskriptif dalam cerita, melainkan hadir sebagai medan politik dan ideologis tempat berbagai kepentingan kekuasaan bertarung. Representasi mengenai tubuh dapat mencerminkan bagaimana masyarakat memandang kehormatan, seksualitas, reproduksi, atau peran sosial perempuan, serta bagaimana tubuh tersebut dapat dijadikan alat kontrol, dominasi, atau resistensi dalam struktur sosial yang patriarkis dan militeristik.

Dalam konteks *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, Pramoedya Ananta Toer menghadirkan narasi yang berfokus pada pengalaman tokoh perempuan untuk

menunjukkan betapa kekuasaan imperialis Jepang tidak hanya bekerja dalam ranah politik dan militer, tetapi juga merembes hingga ke wilayah yang paling personal dan intim, yaitu tubuh. Melalui cara bercerita yang detail dan menggugah, Pramoedya memperlihatkan bahwa yang diperebutkan dalam perang bukan hanya wilayah teritorial, sumber daya alam, ataupun jalur dagang, melainkan juga tubuh perempuan yang dijadikan instrumen pemusas kebutuhan tentara dan bagian dari strategi militer yang lebih luas. Dengan demikian, sastra dalam karya ini bukan hanya merefleksikan kenyataan sejarah, tetapi berfungsi sebagai media kritik yang tajam terhadap praktik kekuasaan yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang sah untuk dikendalikan.

Tubuh perempuan dalam novel tersebut tidak hadir semata sebagai bagian dari narasi atau unsur dramatik, tetapi tampil sebagai medan politik yang sarat dengan perebutan kendali. Negara melalui struktur militer mengatur siapa yang boleh mengakses tubuh itu, dalam kondisi apa, untuk kepentingan apa, serta melalui cara apa tubuh tersebut diposisikan, dipertukarkan, atau dieksplorasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam sistem kolonial dan militeristik tidak pernah bersifat netral, ia selalu mengandung relasi dominasi yang memihak pihak yang berkuasa dan merugikan mereka yang tidak memiliki posisi tawar, dalam hal ini perempuan yang dijadikan Jugun Ianfu. Distribusi kontrol atas tubuh menjadi bagian dari strategi politik yang lebih besar, di mana negara dapat menjustifikasi tindakannya melalui ideologi nasionalisme, retorika kehormatan militer, dan kepentingan perang yang dianggap lebih tinggi dari martabat individu (Pelletier, 2005).

Dengan pembacaan seperti ini, terlihat bahwa novel Pramoedya tidak hanya memaparkan kekejaman masa pendudukan Jepang, tetapi juga mengugat struktur kekuasaan yang mampu mengatur tubuh hingga sedemikian rupa, seakan tubuh perempuan bukan miliknya sendiri, melainkan aset yang bisa dikelola demi kepentingan negara. Sastra, melalui narasi tersebut, menjadi ruang resistensi yang membuka kembali ingatan kolektif dan menyingkap lapisan politik tubuh yang bekerja di balik praktik penjajahan dan perang. Hal itu dapat dipahami dengan melihat bagaimana teori kekuasaan menjelaskan proses pembentukan subjek dan tubuh dalam praktik kolonial.

Kekuasaan, sebagaimana dibahas oleh Michel Foucault, bukan hanya represif tetapi juga produktif, ia membentuk identitas, kesadaran, bahkan citra diri individu. Dalam

novel ini, kekuasaan membentuk ulang tokoh-tokoh perempuan menjadi “penghibur militer” yang kehilangan nama, masa depan, dan kendali atas tubuhnya. Narasi yang diciptakan dalam teks menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan yang tidak hanya bekerja di dunia nyata, tetapi juga di dalam wacana sastra. Dengan demikian, karya sastra menjadi arena penting untuk membongkar bagaimana kekuasaan direproduksi, ditantang, dan diingat melalui bahasa dan tubuh.

“Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer” Karya Pramoedya Ananta Toer: Karya Sastra sebagai Kritik terhadap Kekuasaan

Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan terbesar Indonesia yang dikenal karena keberanian dan konsistensinya dalam menulis tentang penindasan, ketidakadilan, dan perlawanan terhadap kekuasaan. Lahir di Blora pada 6 Februari 1925, Pramoedya mengalami langsung masa-masa kolonialisme, pendudukan Jepang, Revolusi Kemerdekaan, hingga Orde Baru. Sebagai penulis, ia banyak mengalami represi politik. Ia dipenjara oleh Belanda, lalu kemudian oleh rezim Orde Baru selama 14 tahun di Pulau Buru tanpa proses pengadilan, karena dianggap membahayakan stabilitas negara (Setyawan, 2005).

Pengalaman hidup Pramoedya yang keras dan sarat represi tercermin dalam karya-karyanya yang tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga menyuarakan perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Ia dikenal tidak hanya menulis sekadar fiksi, melainkan karya yang kaya akan muatan sejarah, ideologi, dan kritik sosial. Salah satu penghargaan internasional yang diperolehnya adalah *Ramon Magsaysay Award* (1995) atas kontribusinya dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi melalui sastra (Puja, 2009). Pengalaman hidup dan ideologinya ini menjadi latar penting dalam membentuk karakter narasi yang muncul pada novel *Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer*, terutama dalam menggambarkan bagaimana tubuh dan kesadaran perempuan dimanipulasi oleh sistem kekuasaan imperialis.

Novel *Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer* pertama kali diterbitkan pada 2001 dan kemudian dicetak ulang oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada 2015. Novel ini tergolong tipis, namun sarat makna, dan menjadi satu dari sedikit karya sastra

Indonesia yang secara langsung membicarakan tragedi Jugun Ianfu, perempuan muda yang dijadikan budak seksual oleh militer Jepang selama masa pendudukan.

Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu seorang gadis muda tak bernama yang mewakili pengalaman kolektif perempuan-perempuan korban Jugun Ianfu. Tokoh utama tidak diberi nama secara eksplisit, menandai proses dehumanisasi yang dialaminya. Kehilangan nama berarti kehilangan identitas, yang mana hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam analisis politik tubuh. Tokoh ini bersama gadis-gadis lainnya dijanjikan pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan, namun setelah sampai di markas militer, mereka dipaksa menjadi pelayan seksual tentara Jepang.

Latar tempat dalam novel sebagian besar berada di barak militer dan Pulau Buru sebuah ruang tertutup, represif, dan seragam, di mana kontrol atas tubuh sangat ketat. Novel ini tidak menggambarkan kekerasan secara vulgar, namun justru itulah kekuatannya, kekerasan hadir melalui bahasa yang sunyi, diam, dan batiniah. Ini menjadi bagian dari cara kerja kekuasaan hegemonik, membuat yang tertindas diam, menerima, dan merasa tidak punya pilihan.

Novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* merupakan salah satu karya Pramoedya Ananta Toer yang sarat dengan muatan politik dan kritik terhadap kekuasaan. Melalui kisah gadis-gadis muda korban *Jugun Ianfu*, Pramoedya tidak hanya menarasikan penderitaan personal, tetapi juga membongkar bagaimana kekuasaan imperialis bekerja secara halus dan sistemik terhadap tubuh perempuan. Karya ini dapat dibaca sebagai bentuk kritik sastra terhadap biopolitik kekuasaan, di mana negara dalam hal ini Jepang sebagai kekuatan imperialis menggunakan tubuh perempuan sebagai alat untuk menopang stabilitas moral dan ideologi perang. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak sekadar menindas secara fisik, tetapi juga menjajah kesadaran dan identitas perempuan.

Narasi novel mengandung beban historis dan kritik politik yang tajam. Kekuasaan yang tampak bukan hanya dalam bentuk militeristik, tetapi juga ideologis. Pramoedya menyusun cerita ini untuk tidak hanya mengenang, tetapi juga menyuarakan penderitaan yang lama dibungkam. Novel ini menjadi media yang mengungkap bagaimana politik tubuh berjalan bersamaan, tubuh perempuan menjadi sumber daya yang diatur dan dimanfaatkan oleh negara penjajah demi stabilitas militer dan ideologi perang. Selain itu, melalui representasi tersebut, novel ini menghadirkan bentuk politik biokolonialisme,

yakni perpaduan antara logika kolonial dan biopolitik, di mana tubuh perempuan dijadikan wilayah jajahan baru oleh negara. Dengan demikian, karya Pramoedya bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga media kritik terhadap praktik kekuasaan yang menormalisasi penindasan dan dehumanisasi tubuh perempuan.

Dalam novel, politik biokolonialisme menemukan bentuk praktiknya yang paling konkret melalui pembentukan Jugun Ianfu. Negara Jepang membangun jaringan perekutan dan pemindahan perempuan dari berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia, dengan menggunakan legitimasi moral dan propaganda nasionalisme. Tubuh perempuan tidak hanya dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara, tetapi dijadikan instrumen untuk mempertahankan disiplin, moral, dan produktivitas militer. Dengan demikian, kekerasan seksual dalam novel bukan sekadar tindakan individual, melainkan strategi negara yang bekerja melalui tubuh dan pengendalian biologis.

Hegemoni Imperialis Jepang terhadap Pembentukan Jugun Ianfu dalam Novel *Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer*

Novel *Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer* menggambarkan bagaimana kekuasaan Jepang membentuk sistem Jugun Ianfu bukan sekadar melalui kekerasan fisik, tetapi melalui kendali ideologis dan manipulasi wacana. Para tokoh perempuan direkrut bukan dengan ancaman senjata, tetapi melalui janji pekerjaan dan pendidikan, dua hal yang secara sosial dianggap baik dan menjanjikan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Jepang beroperasi dalam bentuk hegemoni, menjadikan penindasan tampak masuk akal dan bahkan seolah-olah menguntungkan pihak yang ditindas.

Dalam novel, kekuasaan tidak langsung menundukkan melalui kekerasan terang-terangan, tetapi melalui kontrol sistemik yang terencana. Saat para gadis sampai di kamp militer, mereka tidak langsung disiksa, mereka diasinkan secara perlahan, dijauahkan dari nama, bahasa, bahkan dari rasa memiliki atas tubuh mereka sendiri. Pada satu titik, narator menyampaikan bahwa mereka tidak lagi dipanggil dengan nama hanya angka dan perintah. Nama, yang menjadi penanda identitas dan kemanusiaan, dihapuskan secara sistemik. Inilah bentuk kekuasaan kolonial yang telah masuk ke dalam tubuh dan kesadaran dalam bentuk paling halus dari dominasi.

Sistem Jugun Ianfu dalam novel menjadi contoh bagaimana kekuasaan negara penjajah menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber daya militer sebagaimana negara mengatur siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Tubuh perempuan dipindahkan, ditundukkan, dan dipakai untuk menopang moral prajurit. Negara mendapatkan “apa” (tubuh perempuan), “kapan” (saat perang berlangsung), dan “bagaimana” (melalui perekrutan yang dimanipulasi) inilah esensi dari politik praktis. Perempuan tidak pernah diberi ruang memilih, sekalipun tidak selalu ada senjata yang diarahkan, struktur dan sistem telah dirancang agar mereka tidak bisa menolak.

Lebih dari itu, Jepang membentuk narasi bahwa perempuan yang menjadi Jugun Ianfu telah berperan penting dalam mendukung perjuangan bangsa Asia. Dalam novel, ada kalimat dari tokoh yang mengatakan bahwa mereka adalah “penghibur yang berguna”. Kalimat ini bukan hanya menunjukkan pasrah, tetapi keberhasilan kekuasaan dalam menginternalisasi ideologi ke dalam tubuh dan pikiran. Itulah hegemoninya, ketika korban tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tetapi sebagai pelaku yang menjalankan tugas mulia. Di titik ini, kekuasaan tidak lagi hanya menindas, tetapi menciptakan kesadaran baru yang membuat penindasan terasa wajar. Ketika tubuh tak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri, di situlah kekuasaan bekerja paling dalam. Novel ini merekam bagaimana tubuh menjadi media tempat kekuasaan menancap dan mengatur segalanya.

Kekuasaan Jepang tidak hanya mempraktikkan biopolitik sebagaimana dijelaskan Foucault yakni pengendalian tubuh melalui disiplin dan pengawasan tetapi juga memperluas menjadi bentuk politik biokolonialisme, di mana tubuh perempuan dijadikan wilayah jajahan baru oleh negara imperialis. Jika biopolitik bekerja dalam kerangka negara modern untuk mengatur kehidupan warga, maka politik biokolonialisme bekerja dalam kerangka imperialis untuk mengeksplorasi tubuh manusia sebagai sumber daya politik dan militer. Melalui sistem *Jugun Ianfu*, tubuh perempuan bukan lagi sekadar objek kekuasaan, melainkan instrumen kolonial yang menopang ideologi dan stabilitas kekuasaan Jepang.

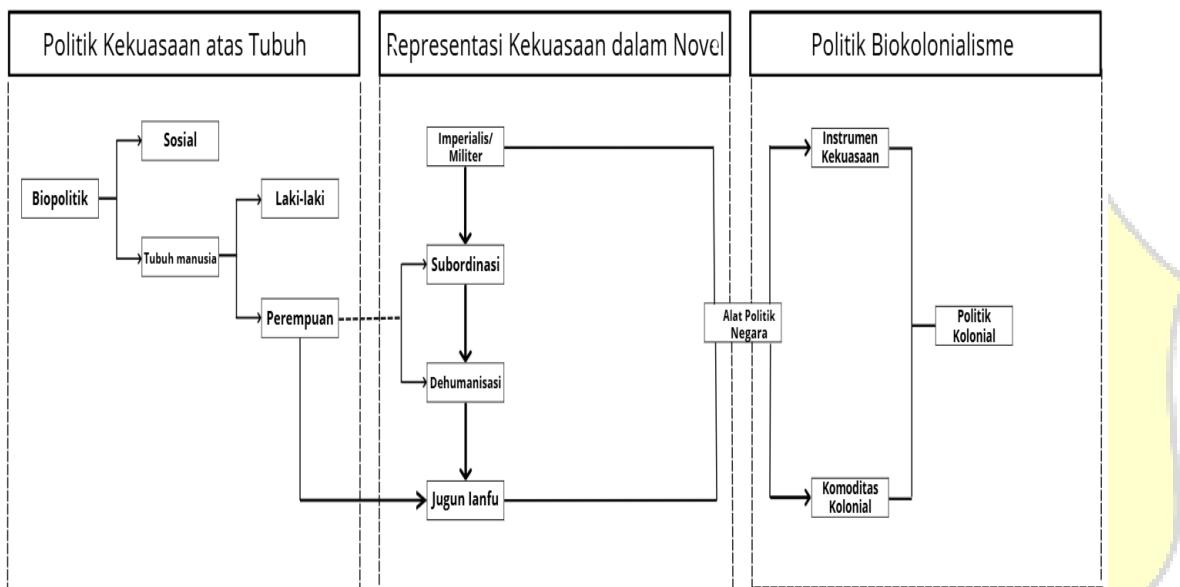
Politik biokolonialisme dalam novel ini menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial Jepang tidak hanya menundukkan wilayah geografis, tetapi juga menembus hingga tingkat paling privat dari tubuh manusia, menjadikannya bagian dari strategi ketahanan militer dan ideologi negara. Tubuh perempuan tidak lagi diperlakukan semata sebagai

objek seksual, melainkan sebagai *modal biologis (biological resource)* yang dimobilisasi dalam sistem politik perang. Negara kolonial mengatur tubuh perempuan layaknya mengelola logistik militer, direkrut, dikelola, didistribusikan, dan dihabiskan untuk mendukung operasi pasukan atau menjadikannya sebuah komoditas kolonial. Dalam struktur militer Jepang, tubuh perempuan diposisikan sebagai *aset biologis yang dieksplorasi tanpa nilai timbal balik*, mereka menjadi ruang pendisiplinan seksual sekaligus sumber daya tubuh yang menopang kesiapan dan stabilitas tentara, meskipun tidak memperoleh manfaat ekonomi, sosial, maupun politik dari pemanfaatan atas tubuh mereka. Pengelolaan tubuh secara demikian menegaskan hadirnya mekanisme kekuasaan biokolonial, di mana penjajahan berlangsung bukan hanya atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga atas fungsi biologis tubuh perempuan yang dijadikan bagian integral dari mesin perang kolonial.

Melalui narasi tokoh perempuan dalam novel, terlihat bagaimana tubuh yang semula adalah milik pribadi berubah menjadi alat negara. Tubuh perempuan tidak lagi menjadi ruang pengalaman subjektif, tetapi dikonstruksi ulang menjadi instrumen dalam strategi militer. Tidak hanya disentuh secara fisik, tubuh mereka dikendalikan secara simbolik, dijauhkan dari bahasa ibu, dari nama, dari rasa memiliki, bahkan dari rasa sakit. Ini adalah penguasaan total atas tubuh, tidak hanya dalam wujud kekerasan, tetapi juga penghilangan makna atas rasa dan identitas.

Politik kekuasaan atas tubuh perempuan dalam novel ini tidak bekerja melalui satu jalan. Ia hadir dalam diam, dalam kepasrahan, dalam hilangnya kemampuan berkata “tidak”. Bahkan ketika tokoh perempuan ingin melarikan diri, ia tidak tahu harus ke mana, karena ia tidak lagi memiliki arah tujuan hidup. Namun demikian, novel ini justru menjadi bentuk perlawanan. Dalam diam narator, dalam sunyi cerita, dalam keengganan untuk menyebut nama, ada semacam suara yang ingin dikenali ulang. Novel ini tidak hanya menarasikan penderitaan, tetapi juga membongkar logika kuasa yang telah menjarah tubuh perempuan. Lewat tokoh tanpa nama yang tetap bertahan, pembaca diajak melihat bahwa tubuh bisa menjadi arsip kekuasaan, tetapi juga bisa menjadi ruang perlawanan paling sunyi dan paling kuat. Selain itu, meskipun negara kolonial menjadikan tubuh perempuan sebagai instrumen perang dan mencoba menguasai seluruh aspek hidup mereka, masih ada bagian dalam diri manusia yang tidak bisa dijajah, yaitu ingatan, rasa

sakit, dan kesadaran akan martabatnya. Novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial dapat mengatur dan mendisiplinkan tubuh mengalihkan, mengendalikan, bahkan membungkam suara perempuan, namun tidak serta-merta mampu menghapus sepenuhnya kemanusiaan yang mereka miliki. Perempuan tetap menyimpan kesadaran bahwa dirinya bukan sekadar alat dalam mesin militer Jepang, dan kesadaran inilah yang menghalangi kekuasaan untuk menjadikannya objek yang sepenuhnya tunduk.



Gambar 1. Bagan Hasil Penelitian Politik Kekuasaan atas Tubuh Perempuan Hegemoni Imperialis Jepang terhadap Pembentukan Jugun Ianfu pada Novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer